

KONSEP KAMPUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

La Ode Abdul Rachmad Sabdin Andisiri¹, Ishak Kadir²

Muhammad Zakaria Umar³

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

Email: ¹sabdinrachmad@gmail.com; ²ishak69kadir@gmail.com; ³ muzakum.uho@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan perdesaan adalah bagian integral dari pembangunan Indonesia. Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia dan sumber daya manusia di perdesaan masih sangat rendah sehingga, arah pembangunan desa sebaiknya mengutamakan manusia dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan sebagai prasarana belajar, (2) menemukan rumusan kawasan binaan kampung kerja sebagai kawasan aglomerasi pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa. Penelitian ini diselenggarakan di Kabupaten Muna dan metode penelitian ini berlandaskan pada paradigma post-positivisme yakni metode studi kasus pendekatan kualitatif dimana aspek – aspek yang dianalisis adalah angkatan kerja, sektor ekonomi, kebutuhan bangunan, infrastruktur, dan zonasi keruangan. Penelitian ini menemukan dua temuan (1) kebutuhan akan fasilitas yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja, (2) rumusan model kawasan binaan kampung pendidikan dan pelatihan kerja sebagai kawasan aglomerasi peningkatan sumber daya manusia perdesaan.

Kata Kunci: Pembangunan, Kampung, Pendidikan, Pelatihan

ABSTRACT

Rural development is an integral part of Indonesia's development, the essence of development is human development and human resources in rural areas are still very low so that the direction of rural development should prioritize humans and job creation. The objectives of this research are (1) find out the facilities needed by rural communities as learning infrastructure, (2) find the formulation of the working area of the working village as an educational agglomeration area as an effort to improve the quality of rural community resources. This research was conducted in Muna Regency and this research method was based on the post-positivism paradigm, a case study method of qualitative approach where the aspects analyzed were labor force, economic sector, building needs, infrastructure, and spatial zoning. This study found two findings (1) the need for facilities needed to improve the quality of the workforce, (2) the formulation of the model of the village built area of education and job training as an agglomeration area to increase rural human resources.

Keywords: Development, Rural, Education, Training

PENDAHULUAN

Sejatinya, hakekat dari pembangunan adalah pembangunan manusia. Adapun infrastruktur hanyalah alat untuk membangun manusia. Sebaik apapun kualitas fisik dari infrastruktur jika tidak mampu menjadi agen perubahan untuk mengangkat aset dan kapasitas manusia maka, ia hanya akan menjadi artefak tanpa makna - makna layaknya kayu yang terlihat kokoh tetapi, keropos oleh rayap di dalamnya. Itulah

mengapa infrastruktur diadakan. Fungsi utamanya bukan untuk memberi penampakan sebuah kota atau desa agar terlihat estetik tetapi, untuk menjadi alat bantu masyarakat perkotaan atau perdesaan menjadi sejahtera. Pesan ini sekiranya penting untuk meluruskan kesalah pahaman dalam memaknai filosofi infrastruktur dimana, sering kali infrastruktur dalam hal kuantitasnya menjadi alat ukur kesuksesan pembangunan dengan mengabaikan daya guna-nya dalam

membangun manusia. Sehingga, pemerintah daerah saling berlomba dalam membangun infrastruktur demi citra sukses dan pada akhirnya mengabaikan asas kebutuhan dan ketepatan guna. Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran secara besar - besaran untuk desa - desa dan sedikit pelatihan - pelatihan diselenggarakan kepada aparatur desa hanya saja kesadaran akan hakekat dari pembangunan perdesaan tidak begitu dijiwai oleh sebagian mereka. Sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat telah begitu mapan tetapi lemah pada pedampingan dan pelaksanaan. Setidaknya, hal itu nampak pada desa - desa di Sulawesi Tenggara. Jika saja pemerintah pusat datang untuk melihat langsung di lapangan begitu semerawutnya proyek - proyek infrastruktur dana desa yang tidak berdaya guna dan berhasil guna. Masyarakat desa telah menjadi subyek dalam pembangunan dimana mereka mengusulkan, merencanakan, dan mengawasi. Hal itu benar namun, perlu diketahui sumber daya manusia desa begitu terbatas sehingga, mereka mengusulkan kegiatan - kegiatan desa berdasarkan keinginan semata bukan pada kebutuhan. Hubungan desa dan kota tidak dapat dipisahkan. Keduanya, saling mempengaruhi dimana, desa menyuplai komoditas pertanian untuk kebutuhan pangan dan industri perkotaan juga sebaliknya, kota menyuplai barang - barang hasil pabrik di perdesaan. Selain itu, hal yang perlu diperhitungkan bagaimana desa menyuplai tenaga kerja di perkotaan dan sebagian besar tenaga kerja kasar. Imigrasi penduduk desa di perkotaan kemudian, berimplikasi pada lonjakan penduduk hingga, menyebabkan persoalan - persoalan seperti, kebutuhan hunian yang meningkat, kebutuhan akan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang meningkat, kebutuhan akan lapangan pekerjaan baru, kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi serta segudang persoalan lainnya. Yang patut menjadi perhatian serius adalah mayoritas para pendatang dari desa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa bekerja dan memiliki pendapatan yang cukup.

Hubungan desa dan kota seharusnya saling komplementaris, kota - kota membutuhkan suplai pangan dan tenaga kerja dari perdesaan. Tetapi, manakala tenaga kerja dari desa tidak mumpuni maka, akan mengurangi produktifitas dari perkotaan. Hal demikian begitu jamak terjadi akibatnya pengangguran terus meningkat dan berimplikasi pada kualitas hidup masyarakat

urban. Kemudian terjadilah kasus - kasus kriminal dan sebagainya dan pada taraf tertentu, akan menyebabkan kemiskinan maka, terciptalah permukiman - permukiman kumuh dan liar yang semakin menambah perbendaharaan masalah di perkotaan.

Peran lembaga pendidikan, akademisi, dan para pemerhati pembangunan desa dan kota menjadi vital untuk ikut berkontribusi dalam memberi gagasan - gagasan menyelesaikan masalah - masalah tersebut. Terdapat semacam kekakuan dalam diskursus akademik dimana, kurikulum lama mesti ditinjau kembali agar lebih implementatif dengan kondisi kekinian. Sebagai contoh di Sulawesi Tenggara jumlah desa - desa mencapai 1.953 buah berbanding 15 Kabupaten dan 2 kota (BPS, 2018). Hal ini, memberikan sebuah potret kepada semua akan pentingnya pembangunan perdesaan. Menyoal pembangunan perdesaan dalam ruang akademik di Sulawesi Tenggara adalah ruang eksklusif bagi ilmu pertanian dan rumpunnya padahal, perlu sebuah pendekatan holistik dalam merencanakan pembangunan desa. Misalnya seorang arsitek, atau insiyur sipil dapat mengurai masalah perdesaan dari perspektif spasial dan infrastruktur tetapi, ruang kosong ini tidak mampu diperankan oleh mayoritas mereka sebab dalam studinya lebih banyak bergelut dengan kota dan infrastrukturnya padahal perbandingan desa dan kota di Sulawesi Tenggara begitu jauh. Para pendamping infrastruktur desa yang ada saat ini terdiri dari arsitek dan sarjana sipil tidak cukup mumpuni karena tidak paham persoalan desa yang asing bagi disiplin keilmuan mereka. Maka, yang terjadi sering kali pendamping berpandangan infrastruktur adalah sebuah produk bukan sebagai agen perubahan.

Penelitian ini, berusaha menghadirkan gagasan untuk, meningkatkan sumber daya manusia perdesaan dalam perspektif spasial dan memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku pembangunan perdesaan untuk lebih menjiwai pembangunan desa dengan memahami hakekatnya dimana tujuan akhir dari pembangunan adalah peningkatan aset dan kapabilitas masyarakat desa serta mempertimbangkan anggaran desa saat ini yang cukup besar agar dapat dioptimalkan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan. Penelitian ini diselenggarakan di Kabupaten Muna sebagai salah satu Kabupaten penyuplai tenaga kerja terbesar di kota Kendari.

Pada akhirnya, penelitian ini coba mengerahkan agar pembangunan perdesaan

lebih mengutamakan pada peningkatan sumber daya manusia perdesaan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk benar - benar mendukung pembangunan manusia tidak hanya sebagai produk semata yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. Sebesar apapun anggaran negara yang didistribusikan kepada desa tetapi sumber daya manusia perdesaan yang lemah akan menjadi sia - sia belaka sebab rendahnya SDM menjadikan masyarakat membelanjakan anggaran pada kegiatan - kegiatan yang tidak produktif. Olehnya Judul penelitian ini adalah "Perencanaan Kampung Pendidikan Kerja" diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembangunan perdesaan dan menjadi referensi kepada pemerintah desa dan daerah dalam mengambil kebijakan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan yakni:

1. Fasilitas apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat Muna dalam membangun kampung kerja?
2. Bagaimana rumusan kawasan binaan kampung kerja dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia desa berdasarkan potensi desa?

Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan sebagai prasarana belajar.
2. Menemukan rumusan kawasan binaan kampung kerja sebagai kawasan aglomerasi pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Alasan pemilihan metode ini untuk mengetahui permasalahan – permasalahan dalam pembangunan perdesaan pada beberapa program pemerintah di Kabupaten Muna beserta faktor – faktor yang melatar belakangnya serta merumuskan suatu konsep pembangunan perdesaan yang kontekstual sebagai langkah solutif dalam menyelesaikan permasalahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam

penelitian adalah mendapatkan data dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai obyek yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara. Adapun kebutuhan data guna tercapainya tujuan penelitian ini ada pada tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Variabel I	Variabel II
1	Mengetahui fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan sebagai prasarana belajar.	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Primer • Sektor Sekunder • Sektor Tersier 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Infrastruktur
2	Menemukan rumusan kawasan binaan kampung kerja sebagai kawasan aglomerasi pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk • Zonasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Zona Pendidikan dan Pelatihan • Zona Perumahan • Zona Peribatan, olahraga, rekreasi, dan kesehatan • RTH

Sumber : Analisis Penulis, 2018

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini lebih bersifat interpretatif makna ke dalam deskripsi naratif dimulai dari mengorganisasi informasi, mempelajari informasi dan kodefikasi, mengurai kasus dan konteksnya, menginterpretasi temuan, dan meyajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah masyarakat Kabupaten Muna mencapai 215.442 jiwa yang tersebar di dua puluh dua kecamatan dari angka itu jumlah angkatan kerja 129.768 dan pengangguran terbuka tercatat sebesar 6.577 jiwa (BPS, 2017). Para pekerja ini memiliki tingkat pendidikan yang variatif dan kami mengklasifikasikan para pekerja yang tidak memiliki kualitas mumpuni dalam bekerja dibatasi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Adapun jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pekerja Berdasarkan Pendidikan

No	Pekerja Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	25.397
2	SD	25.812
3	SMP	20.890
4	SMA	21.208
5	Tidak Sekolah	10.537

Sumber :BPS, 2018

Angka - angka pada uraian dan tabel di atas sejatinya telah menyiratkan pesan akan pentingnya pembangunan kampung pendidikan dan pelatihan kerja. Saat ini telah cukup banyak kampus atau sekolah tinggi untuk mendapatkan pendidikan tetapi, tidak semua mampu melanjutkan studi karena faktor finansial dan beberapa cukup mampu untuk bersekolah tetapi, tidak ada keinginan dikarenakan pertimbangan waktu yang cukup lama untuk studi. Selain itu, pembangunan kampung pendidikan kerja juga mampu menahan gelombang imigrasi penduduk desa kualitas rendah ke perkotaan.

Uraian mengenai hasil dan temuan pada penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bahasan (1) fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sebagai prasarana pendidikan kerja, (2) rumusan kawasan binaan kampung pendidikan dan pelatihan kerja, (3) konsep aglomerasi pertanian terpadu.

Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Secara garis besar ekonomi dibagi tiga yakni (1) sektor primer, (2) sektor sekunder, dan (3) sektor tersier olehnya, dalam menyiapkan tenaga kerja sebaiknya didasarkan pada tiga sektor utama tersebut. Menurut (Andisiri dan Faslih, 2018) dalam buku perencanaan perdesaan perspektif spasial, sektor primer dalam hal ini pertanian meliputi sub – sub sektor pertanian lahan basah, lahan kering, perikanan budi daya, peternakan, dan perkebunan serta pertambangan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Muna adalah salah satu daerah dengan desa – desa yang memiliki potensi pertanian serta Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah penghasil tambang yang besar. Sektor sekunder berupa pabrik – pabrik pengolahan pasca panen. Sektor tersier berupa pelayanan jasa dan sebagainya. Untuk pembangunan manusia perdesaan juga diperlukan keterampilan bahasa hal ini terkait dengan misi pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam membangun dan mengembangkan sektor pariwisata.

Olehnya, didapatkan kebutuhan prasarana sebagai fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan Data

No	Sektor Ekonomi	Prasarana	Tujuan
1	Sektor primer	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pelatihan dan Pendidikan Kerja Sektor Primer Pertanian Bangunan Pelatihan dan Pendidikan Kerja Sektor Primer Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga kerja pertanian yang terampil Menyiapkan tenaga kerja pertambangan yang terampil
2	Sektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pelatihan dan Pendidikan Kerja Sektor Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga kerja pabrik yang terampil
3	Sektor Tersier	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Pelatihan dan Pendidikan Kerja Sektor Tersier Bangunan pusat pelatihan bahasa 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga kerja pelayanan jasa yang terampil Menyiapkan tenaga kerja pelayanan jasa bahasa asing

Konsep kampung pendidikan dan pelatihan kerja memusatkan kegiatan pembangunan manusia perdesaan pada satu kawasan yang terpusat dengan segenap fasilitas di dalamnya. Di kawasan ini, masyarakat perdesaan yang dididik dan dilatih tidak tinggal untuk selamanya melainkan, untuk sementara waktu saja setelah pelatihan dan pendidikan dianggap cukup maka peserta akan meninggalkan kampung pendidikan dan pelatihan kerja untuk dikembalikan di desa masing – masing guna mengimplementasikan hasil pelatihannya atau dapat dikirim di perkotaan sebagai tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Olehnya, dalam masa – masa pendidikan dan pelatihan para peserta membutuhkan fasilitas pendukung yang kami jabarkan pada tabel 4.

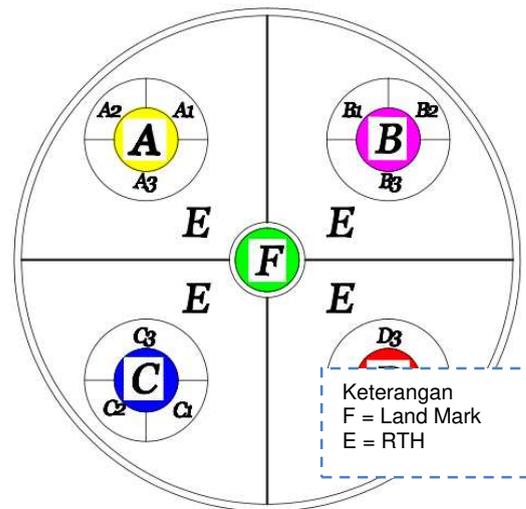
Tabel 4. Kebutuhan Data

No	Jenis Kegiatan	Fasilitas
1	Bermukim	<ul style="list-style-type: none"> Asrama Perbelanjaan
2	Beribadah	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Ibadah
3	Kesehatan, Rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> Joging Trek RTH

Rumusan Kawasan Binaan Kampung Pendidikan Dan Pelatihan Kerja

Memusatkan kampung pendidikan dan pelatihan kerja pada satu kawasan khusus yang terpisah dengan perdesaan yang ada, serta para peserta didik dan pelatihan tinggal dalam kawasan adalah untuk memfokuskan para peserta dalam belajar dan berlatih juga untuk memfilter pengaruh lingkungan terhadap para peserta. Di perdesaan Kabupaten Muna sering kali kita jumpai perilaku negatif yang berakibat buruk pada perilaku dan masa depan generasi muda. Pemusatan juga diharapkan mampu memberikan energi positif kepada para peserta untuk saling bahu – membahu dalam belajar, saling berbagi informasi dan jejaring. Olehnya, dalam rangka mewujudkan misi pembangunan manusia perdesaan melalui pembangunan kampung pendidikan dan pelatihan kerja dibagi pada empat zona utama berdasarkan tipologi masing – masing. Berikut rumusan kawasan binaan dan penjelasannya:

1. Zona A, merupakan kawasan pendidikan, dan pelatihan sektor primer (pertanian, dan pertambangan) dengan fasilitas permukiman (A3), perbelanjaan (A2), dan peribadatan, dan kesehatan (A1).
2. Zona B, merupakan kawasan pendidikan, dan pelatihan sektor sekunder dengan fasilitas permukiman (B3), perbelanjaan (B2), dan peribadatan, dan kesehatan (B1).
3. Zona C, merupakan kawasan pendidikan, dan pelatihan sektor tersier dengan fasilitas permukiman (C3), perbelanjaan (C2), dan peribadatan, dan kesehatan (C1).
4. Zona D, merupakan kawasan pendidikan, dan pelatihan bahasa asing dengan fasilitas permukiman (A3), perbelanjaan (A2), dan peribadatan, dan kesehatan (A1).



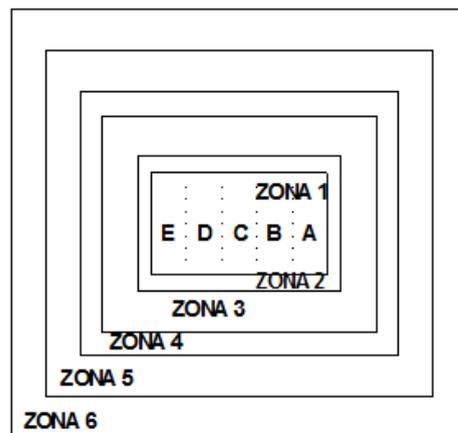
Gambar 1. Model Kampung Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Konsep Aglomerasi Pertanian Terpadu sebagai Lapangan Kerja

Aglomerasi pertanian terpadu adalah kawasan lokalisasi pemusatan kegiatan sektor primer pertanian meliputi sub-sub sektor pertanian lahan basah, kering, tanaman perkebunan, perikanan budidaya, sektor sekunder berupa pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanian pascapanen secara terpadu dengan permukiman petani, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan serta jasa komersil pemasaran produk hasil tani dan pabrik yang terpusat pada suatu lokasi. (Andisiri dan Faslih, 2018) Dengan konsep aglomerasi pertanian dimana kegiatan sektor primer terkonsentrasi pada satu lokasi diharapkan dapat memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi di satu lokasi dapat dimanfaatkan secara optimal dimana mampu memberikan pelayanan sekaligus bagi kegiatan pertanian lahan basah, lahan kering, perikanan budidaya, dan peternakan. Sehingga pembangunan bendungan dan irigasi sesuai dengan prinsip kebutuhan dan ketepatan guna.

Sebagai diversifikasi ekonomi pada kawasan aglomerasi pertanian terpadu juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pertanian (agro tourism) jadi selain pembangunan sektor primer yang dapat memasok kebutuhan pangan daerah bahkan mendukung kebutuhan pangan nasional dilengkapi dengan sektor sekunder berupa pengolahan pasca panen yang dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat dalam industri pertanian serta mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor tersier juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pertanian yang tentunya menjadi pendapatan tambahan dan promosi bagi pembangunan pertanian daerah secara nasional dan diharapkan akan terwujud suatu daerah yang mandiri dan optimum dalam pembangunannya. Konsep aglomerasi pertanian terpadu secara konseptual berusaha menjawab permasalahan di perdesaan yang corak bertaniya masih bersifat subsisten atau agraris seperti di desa-desa Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Konsep ini menyatukan seluruh kegiatan pertanian pada satu lokasi potensial dan lokasi aglomerasi pertanian bisa memberikan efek rembesan bagi tumbuh dan berkembangnya desa-desa di sekitar kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi pertanian terpadu ini terdiri dari beberapa zona di dalamnya dalam rangka mendukung kegiatan produktif dari petani. Pentingnya penzoningan ruang tersebut adalah agar tidak terjadi kesemerawutan pengelolaan dan konflik antar penggunaan lahan. Penzoningan bagi kegiatan pertanian meliputi sub-sub sektor pertanian lahan basah, kering, tanaman perkebunan, perikanan budidaya, disusun berdasarkan tingkat kebutuhan air dengan jarak dari sumber mata air dengan asumsi lahan yang bersifat homogen.

Adapun gambar dan penjelasan penzoningan kawasan aglomerasi pertanian terpadu adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Aglomerasi Pertanian Terpadu

- A. Zona 1 adalah kawasan pengembangan sektor primer pertanian meliputi sub-sub sektor pertanian lahan basah, lahan kering, perikanan budidaya, peternakan, dan perkebunan.
1. Sub zona A difungsikan sebagai kawasan budidaya perikanan. Kawasan budidaya perikanan menempati zona A atau zona paling dekat dengan sumber mata air sebab kegiatan budidaya perikanan adalah kegiatan produktif yang membutuhkan air paling banyak dari kegiatan produktif lainnya.
 2. Sub zona B difungsikan sebagai kawasan pertanian lahan basah (padi sawah). Kawasan pertanian lahan basah khususnya budidaya padi sawah menempati zona B karena kegiatan budidaya padi sawah memerlukan kebutuhan air yang besar setelah kegiatan budidaya perikanan.
 3. Sub zona C difungsikan bagi kegiatan pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering dimana ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegiatan ini menjadi pilihan pada Zona C sebab kebutuhan air untuk pertanian lahan kering itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Zona A dan B.
 4. Sub Zona D Kawasan budidaya peternakan ditempatkan di Zona D sebagai lokasi yang paling tepat bagi kegiatan pengembangan peternakan baik itu peternakan unggas, peternakan sapi, dll. Zona D menjadi lokasi potensial bagi pengembangan peternakan dari jaraknya yang masih cukup dekat dengan sumber mata air dan Zona D memiliki kebutuhan air yang relatif lebih sedikit dibanding Zona A, B, dan C. Selain itu kotoran dari

- hewan ternak juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman pertanian lahan kering dan perkebunan jadi selain dapat menikmati keuntungan-keuntungan lokalisasional juga antar sektor dapat saling mendukung bagi pengembangannya.
5. Sub Zona E merupakan kawasan yang difungsikan bagi tanaman perkebunan sebagai diversifikasi sektor primer seperti perkebunan coklat, perkebunan tebu dll. Sebagaimana konsep aglomerasi pertanian terpadu yang menyatukan sektor primer dalam satu lokasi dan dengan penyatuan ini sehingga bisa saling mendukung antar satu dengan yang lain juga dapat menikmati penghematan-penghematan lokalisasional.
 - B. Zona 2 adalah sebagai ruang terbuka dimana tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya agar kegiatan pertanian meliputi sub-sub sektor yang ada dibawahnya tidak terkontaminasi langsung dengan aktivitas penduduk diluar dari kegiatan pertanian. Pada zona ini sebagaimana fungsinya sebagai ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dengan dibangun taman-taman dan juga sarana olahraga bagi petani dan juga masyarakat setempat.
 - C. Zona 3 merupakan kawasan permukiman petani yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Salah satu permasalahan perdesaan khususnya di Kabupaten Muna adalah pendidikan dan kesehatan bagi keluarga petani. Dengan corak bertani yang masih berpindah-pindah selain menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya lahan-lahan tani subur juga menyulitkan anak-anak petani untuk akses ke sekolah-sekolah atau Puskesmas sebab mayoritas petani memiliki lahan pertanian yang cukup jauh dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang disediakan Pemerintah sehingga konsep aglomerasi pertanian terpadu menyatukan permukiman petani dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar petani dan keluarganya bisa mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak dengan akses yang mudah. Dengan kemudahan-kemudahan lokalisasional tersebut diharapkan kapasitas personal, dan komunitas petani bisa meningkat sehingga produksi pertanian dapat meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan pangan Daerah. Selain itu anak-anak petani dengan bekal pendidikan dan kesehatan yang baik diharapkan mampu menjadi generasi yang berkualitas atau dapat menjadi petani-petani moderen agar visi pemangunan daerah yakni swasembada pangan dapat dicapai.
 - D. Zona 4 adalah zona peralihan yang tidak difungsikan untuk kegiatan budidaya sebab pada zona 5 difungsikan sebagai kawasan pabrik pengolahan pasca panen. Pentingnya zona peralihan ini yakni agar kegiatan petani tidak terkontaminasi langsung dengan kegiatan pengolahan pasca panen (agro industri) yang dapat mengganggu kesehatan rumah tangga dan juga terbebas dari polusi suara dan udara dari pabrik.
 - E. Zona 5 difungsikan untuk pembangunan sektor sekunder yakni pabrik-pabrik pengolahan pasca panen dan pengolahan pupuk pertanian dan perkebunan. Jarak yang dekat dengan lahan-lahan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan akan memberikan kemudahan akses pengangkutan hasil-hasil pertanian ke fasilitas pabrik dan keberadaan pabrik-pabrik yang saling berdekatan sebagaimana fungsi dari zona 5 sebagai lokasi pabrik akan memberikan keuntungan-keuntungan berupa penghematan-penghematan lokalisasional seperti penggunaan listrik dan alat-alat pabrik dimana pemilik pabrik dapat saling bekerja sama. Pentingnya pembangunan sektor sekunder agar komoditas pertanian dapat ditingkatkan nilai jualnya melalui pabrik sehingga mampu meningkatkan aset dan kapabilitas masyarakat perdesaan dan mampu mendukung pembangunan daerah pada umumnya. Pembangunan industri pertanian dapat membuka lahan pekerjaan yang besar bagi masyarakat perdesaan dan mampu menarik investasi bagi masyarakat setempat. Hasil produksi pabrik-pabrik pasca panen contohnya tebu menjadi gula, jagung menjadi tepung maizena, singkong menjadi tepung tapioka dapat menjadi komoditas yang selain dikonsumsi di daerah dan nasional juga dapat menjadi komoditas ekspor sampai di pasar luar negeri.
 - F. Zona 6 dimanfaatkan khusus untuk pembangunan sektor tersier yakni jasa komersil berupa pasar penjualan hasil-hasil pertanian, hasil-hasil pabrik serta jasa perbankan dengan pembangunan bank tani untuk mendukung pembangunan pertanian pada kawasan aglomerasi

pertanian terpadu. Permasalahan petani yakni terkait pemasaran hasil pertanian berupa akses dari lahan tani yang jauh dari pasar bisa teratasi dengan pembangunan lokasi pertanian yang terpadu dengan pasar penjualan hasil pertanian. Masyarakat perdesaan dapat membeli hasil tani yang masih segar langsung ke kawasan aglomerasi pertanian terpadu setiap saat dan taraf hidup petani dapat meningkat karena dapat menjual sendiri hasil tani langsung kepada konsumen. Petani dan pengusaha juga dapat menikmati keuntungan-keuntungan lokalisasional dimana biaya transportasi dari lahan tani dan pabrik bisa ditekan sebab antara lahan tani, pabrik, dan pasar berada di satu kawasan terpadu. Pemerintah daerah juga akan diuntungkan sebab dengan keberadaan kawasan aglomerasi pertanian terpadu tidak membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur yang mahal sebab jarak antara lahan tani, pabrik dan pasar saling berdekatan. Tidak seperti selama ini dimana lahan-lahan tani yang tersebar di seluruh kawasan perdesaan dan corak bertani yang masih berpindah-pindah membutuhkan biaya yang besar bagi pemerintah daerah untuk pembangunan jalan usaha tani serta infrastruktur pendukungnya. Bahkan pembangunan jalan usaha tani yang begitu masif di perdesaan menjadi pemborosan sumberdaya sebab sebagian besar sudah tidak dimanfaatkan lagi akibat corak bertani yang berpindah-pindah. Konsep aglomerasi pertanian terpadu berusaha menjawab masalah-masalah di perdesaan dengan melokalisasi kawasan. Pembangunan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier diharapkan saling komplementaris dalam mendukung pembangunan perdesaan pada khususnya dan daerah pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat hasil dan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Muna mulai dari tidak sekolah sampai dengan tidak tamat SMA total berjumlah 103.844 Jiwa perlu difasilitasi melalui kawasan binaan kampung pendidikan dan pelatihan kerja sebagai upaya penyiapan dan peningkatan kualitas angkatan kerja.

2. Diperlukan kebijakan spasial berupa rumusan kawasan binaan yang terintegrasi berupa pembangunan manusia melalui kampung pendidikan dan pelatihan kerja serta lapangan kerja yang kontekstual dengan potensi wilayah dan manusia Kabupaten Muna melalui kawasan aglomerasi pertanian terpadu.

Saran

Pada penelitian ini terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penelitian selanjutnya. Kekurangan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penelitian ini berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi seperti pengangguran dengan determinisme arsitektur melalui rekayasa lingkungan binaan maka, diperlukan kajian mendalam dari berbagai disiplin keilmuan lainnya. Sehingga, akan hadir sebuah gagasan komprehensif dalam membangun masyarakat perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andisiri, L.A.R.S., & Faslih, A., (2018). *Perencanaan Perdesaan Perspektif Spasial*, Kendari: UHO Press.
- BPS, (2017). *Kabupaten Muna Dalam Angka*, Kendari: BPS Sultra.
- BPS, (2018). *Sulawesi Tenggara Dalam Angka*, Kendari: BPS Sultra.
- Sugiyono, (2014), *Skripsi Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta.